

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap unit kerja di kementerian atas penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Laporan kinerja disusun periodik baik triwulanan (LKj Interim) dan/atau tahunan (LKj Tahunan). Penyusunan laporan kinerja meliputi pengukuran kinerja, evaluasi, serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai terhadap hasil capaian target kinerja. Pelaporan kinerja dilaksanakan dengan tujuan memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja.

Laporan Kinerja (LKj) Triwulan I Tahun 2026 Balai PK Kupang merupakan bentuk pertanggungjawaban dan evaluasi dari pelaksanaan kegiatan dalam jangka waktu 3 bulan dari bulan Januari hingga Maret 2026. Pada pelaporan Kinerja Triwulan I Tahun 2026 data capaian dan target kinerja Balai PK Kupang telah disampaikan secara lengkap dan disertai dokumen data dukung yang tersimpan di dalam folder https://bit.ly/SAKIP_DJPK. Capaian kinerja organisasi Balai PK Kupang Triwulan I Tahun 2026 sesuai dengan aplikasi pengelolaan kinerja (kinerjaku.kkp.go.id) adalah **117,5 (Istimewa)**.

Capaian Indikator Kinerja Balai PK Kupang pada Triwulan I Tahun 2026 ini yaitu **(1)** Biota Perairan yang Dimanfaatkan secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPK Kupang 54 Spesies (Target 21 Spesies), **(2)** Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup BPK Kupang 100% (target 81%), **(3)** Laporan SPIP yang disusun lingkup BPK Kupang 1 Laporan (target 1 Laporan), dan **(4)** Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP lingkup BPK Kupang 100% (target 74%).

Berdasarkan data dari aplikasi MyIntress Kemenkeu, Jumlah pagu anggaran Balai PK Kupang per Maret 2026 adalah sebesar Rp19.270.598.000,- yang

bersumber dari Rupiah Murni (RM), dan Pinjaman Luar Negeri (PLN) untuk pelaksanaan *Oceans for Prosperity Project-LAUTRA*, namun demikian terdapat blokir pagu anggaran dalam rangka efisiensi berdasarkan Surat Menteri Keuangan No S-817/MK.03/2025 sebesar Rp1.574.762.000,- dan blokir pagu anggaran dikarenakan kekurangan data dukung sebesar Rp730.000, sehingga pagu anggaran optimal yang dapat digunakan untuk pencapaian target indikator kinerja pada tahun 2026 ini adalah sebesar Rp17.695.106.000. **Realisasi anggaran** total pada Triwulan I tahun 2026 berdasarkan aplikasi MyIntress Kemenkeu adalah sebesar **Rp3.550.038.614**, sehingga persentase realisasi anggaran adalah 18,42% berdasarkan pagu anggaran total atau 20,06% berdasarkan pagu efektif.

Selain itu, Balai PK Kupang juga turut berkontribusi terhadap penerimaan negara, adapun target perkiraan penerimaan negara bukan pajak (**PNBP**) Balai PK Kupang pada tahun 2026 adalah sebesar Rp3.500.000.000, dengan realisasi pendapatan hingga Triwulan I tahun 2026 adalah sebesar **Rp721.714.673,-** atau tercapai **20,62%** dari target.

Pada Triwulan I tahun 2026 Balai PK Kupang telah memperoleh total 3 penghargaan atas prestasi dan kinerja yang telah dilakukan, antara lain:

1. NKO Baik Triwulan IV 2025
2. Unit Organisasi Informatif 2025 KKP
3. Unit Organisasi Terbaik dalam pelaksanaan KIP 2025 Lingkup KKP

Berdasarkan kondisi existing pelaksanaan kinerja organisasi serta pelaksanaan program dan kegiatan Balai PK Kupang di Triwulan 1 Tahun 2026 terdapat tantangan yang menjadi perhatian yaitu:

1. Terdapat perubahan pagu anggaran akibat kebijakan efisiensi anggaran.
2. Beberapa pegawai pengelola kawasan konservasi masih belum memiliki kompetensi dalam pelaksanaan pelayanan perizinan pemanfaatan jenis biota perairan.
3. Pengelolaan dan penanganan konflik biota buaya belum optimal.

Beberapa hal yang menjadi rekomendasi guna menjawab tantangan tersebut dan/atau dilaksanakan pada periode berikutnya, yaitu:

1. Melakukan perubahan dokumen Perjanjian Kinerja dengan menyesuaikan total pagu anggaran yang baru.
2. Melaksanakan pelatihan pelayanan perizinan pemanfaatan jenis biota perairan.
3. Melakukan koordinasi dengan BKSDA dalam rangka penguatan pengelolaan biota buaya.